

**Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah
Ditinjau Dari Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana
Perimbangan dan Opini Audit BPK**

(Studi Pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah Periode 2020-2023)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S-1



Disusun Oleh:

Alfina Al Marsa Putri

NIM 31402100220

**PROGRAM STUDI S-1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2025

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH JAWA
TENGAH DITINJAU DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA
MODAL, DANA PERIMBANGAN DAN OPINI AUDIT BPK**

(Studi Pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah Periode Anggaran 2020-2023)

Disusun Oleh:

Alfina Al Marsa Putri

NIM : 31402100220

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia ujian ujian Skripsi Program Studi S1 Akuntansi

Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 23 April 2025

Pembimbing,



Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si., CSRS

NIK. 211415029

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH JAWA TENGAH DITINJAU
DARI PENDAPATAN ASLI DAERAH, BELANJA MODAL, DANA PERIMBANGAN DAN
OPINI AUDIT BPK

Disusun oleh:

Alfina Al Marsa Putri

NIM : 31402100220

Telah dipertahankan di depan dosen penguji pada tanggal 28 April 2025

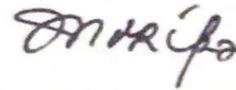
Susunan Dewan Penguji

Pembimbing



Dr. Dra. Winarsih, SE., M.Si., CSRS
NIK. 211415029

Penguji I



Prof. Dr. Hi. Indri Kartika, M.Si, Akt., CA
NIK. 211490002

Penguji II



15 Mei 2025

Sri Dewi Wahyundaru, SE., M.Si, Ak., CA., ASEAN CPA., CRP
NIK. 211492003

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana
Akuntansi tanggal 28 April 2025

Ketua Program Studi S1 Akuntansi



Provita Wiliyanti, SE., M.Si, Ph.D., Ak., CA., JFP., AWP
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Alfina Al Marsa Putri

NIM : 31402100220

Program Studi : S1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini saya menyatakan skripsi dengan judul:

“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Ditinjau Dari Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Opini Audit BPK”

Pernyataan ini merupakan hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiarisme dari skripsi orang lain. Seluruh dari skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri sebagai penulis. Saya bersedia menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran etika akademik dalam skripsi ini. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

Semarang, 16 Mei 2025

Yang membuat pernyataan



Alfina Al Marsa Putri

NIM. 31402100220

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfina Al Marsa Putri
NIM : 31402100220
Program Studi : S1 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul **“Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah Ditinjau Dari Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Opini Audit BPK”** dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 16 Mei 2025



Alfina Al Marsa Putri

NIM. 31402100220

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

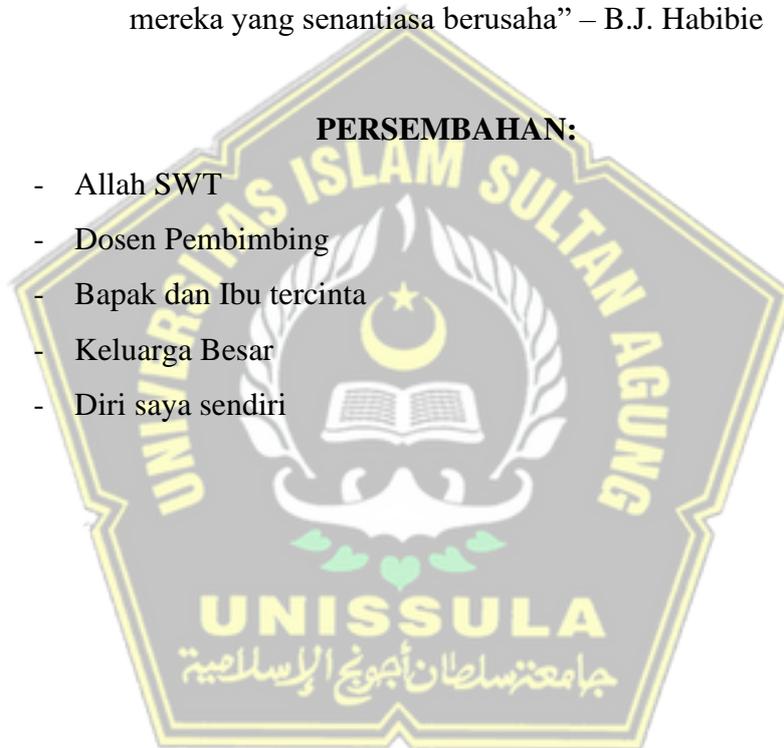
MOTTO:

"Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan" QS. Al-Insyirah Ayat 5-6

“Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha” – B.J. Habibie

PERSEMBAHAN:

- Allah SWT
- Dosen Pembimbing
- Bapak dan Ibu tercinta
- Keluarga Besar
- Diri saya sendiri



ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan, dan untuk menganalisis dan mengetahui opini audit terhadap kinerja keuangan. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020-2023. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 140 sampel dengan metode sensus sampling. Data diaolah menggunakan perangkat lunak IMB SPSS 26. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Menurut temuan penelitian pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan, belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan, dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan dan opini audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan, opini audit, kinerja keuangan.

ABSTRACT

This research aims to analyze and determine the influence of local own-source revenue on financial performance, to analyze and determine the influence of capital expenditure on financial performance, to analyze and determine the influence of balancing funds on financial performance, and to analyze and determine the audit opinion on financial performance. The population used in this study is the Regional Government Financial Statements for the 2020-2023 fiscal years. The total sample used in this study is 140 samples using the census sampling method. The data was processed using IBM SPSS 26 software. The analytical tool used in this research is multiple linear regression. According to the research findings, local own-source revenue has an influence on financial performance, capital expenditure does not have an influence on financial performance, balancing funds do not have an influence on financial performance, and the audit opinion does not have an influence on financial performance.

Keywords: *local own-source revenue, capital expenditure, balancing funds, audit opinion, financial performance.*

INTISARI

Pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah dapat dicapai dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan dan opini audit terhadap kinerja keuangan. Penelitian ini menggunakan teori agensi sebagai *grand theory*. Penelitian ini memiliki 4 hipotesis yaitu : 1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan; 2) Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan; 3) Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan; 4) Opini Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

Teori agensi menjelaskan hubungan antara pemberi kuasa (*principal*) dan orang yang diberi kuasa (*agent*) yang bekerja sama untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas, di mana pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan keputusan yang diambil kepada masyarakat yang diwakili oleh legislatif sebagai agen, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Relevansi antara teori keagenan dengan kinerja keuangan dapat dilihat dari adanya peran pengelolaan keuangan pemerintah daerahnya.

Penelitian ini menggunakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2020-2023 sebagai populasi. Total sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 140 sampel dengan metode sensus sampling. Data diaolah menggunakan perangkat lunak IMB SPSS 26. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

regresi linear berganda. Berdasarkan pengujian hipotesis pada penelitian ini disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan, Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan, Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Dan Opini Audit berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penggunaan Opini Audit sebagai variabel independen untuk mengukur kesesuaian dengan standar akuntansi, sementara kinerja keuangan pemerintah daerah diukur berdasarkan indikator yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran. Selain itu, adanya perbedaan dalam interpretasi dan penerapan standar akuntansi di berbagai daerah dapat mempengaruhi hasil penelitian dan mengurangi generalisasi temuan.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel yang dianalisis dengan memasukkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti manajemen risiko, kebijakan fiskal, dan kondisi ekonomi makro. Penelitian juga sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti analisis kuantitatif dan kualitatif.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji Syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan berkat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan pra skripsi yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah Ditinjau Dari Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Opini Audit BPK” (Studi Pada Pemerintah Daerah Jawa Tengah Periode 2020-2023).

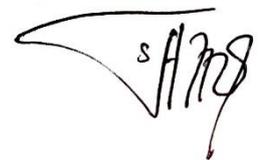
Penyusunan pra skripsi ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program S1 pada Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung. Selama proses penyusunan pra skripsi, penulis menyadari bahwa selesainya pra skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, arahan, bimbingan, petunjuk serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyono, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung
2. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Akt., CA. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung
3. Ibu Dr. Dra. Winarsih, SE, M.Si., CSRS selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dan penuh kesabaran memberikan bimbingan, saran, dan arahan kepada penulis dalam penyusunan pra skripsi ini hingga selesai.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan bekal berupa pengetahuan sebagai pedoman dalam penulisan pra skripsi.

5. Seluruh staff, karyawan TU, petugas administrasi dan seluruh pegawai Fakultas Ekonomi yang senantiasa membantu penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Ekonomi.
6. Orang tua tercinta penulis, Bapak Safaat dan Ibu Semi serta keluarga besar yang telah memberikan semangat, dukungan dan doa yang tidak pernah berhenti dipanjatkan untuk keberhasilan penulis.
7. Teman masa kecil penulis Della, Niken, Mega, Ashlyn, Rasi dan Lala yang sudah senantiasa memberikan dukungan dan doa serta selalu ada dikala susah maupun senang.
8. Semua teman perkuliahan penulis yang telah memberikan semangat, dukungan dan membantu penulis selama perkuliahan.
9. Untuk diri saya sendiri yang sudah berjuang dan tak kenal lelah serta selalu berusaha ntuk keberhasilan diri sendiri.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat menyempurnakan pra skripsi sehingga dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca.

Semarang, 4 November 2024



Alfina Al Marsa Putri

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
KATA PENGANTAR	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Pertanyaan Penelitian	10
1.4. Tujuan Penelitian.....	10
1.5. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. <i>Grand Theory</i>	13
2.1.1. Teori Agensi	13
2.2. Variabel Penelitian	14
2.2.1 Kinerja Keuangan.....	14
2.2.2. Pendapatan Asli Daerah.....	18
2.2.3. Belanja Modal.....	19
2.2.4. Dana Perimbangan.....	21
2.2.4.1 Jenis-jenis Dana Perimbangan	21
2.2.5. Opini Audit BPK	23
2.3. Penelitian Terdahulu.....	24
2.4. Kerangka Penelitian Teoritis & Pengembangan Hipotesis	29
2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan.....	29
2.4.2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan.....	30
2.4.3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan.....	32

2.4.4. Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan	33
2.5. Kerangka Penelitian Teoritis	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Jenis Penelitian	38
3.2. Populasi	38
3.3. Sampel	38
3.4. Sumber dan Jenis Data	38
3.5. Metode Pengumpulan Data	39
3.6. Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel	39
3.6.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	40
3.7. Teknik Analisis.....	42
3.8. Analisis Deskriptif.....	42
3.8.1. Uji Asumsi Klasik.....	43
3.8.2. Model Regresi Berganda	44
3.8.3. Uji Kelayakan Model.....	45
3.8.4. Pengujian Hipotesis Statistik (Uji t)	46
BAB IV	48
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1. Hasil Penelitian.....	48
4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
4.2. Hasil Uji Analisis Data.....	48
4.2.1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif	48
4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	51
4.4. Model Regresi Berganda	56
4.5. Uji Kelayakan Model (Goodness Of Fit)	57

4.6. Pengujian Hipotesis.....	59
4.6.1. Uji Parsial	59
4.7. Pembahasan Hasil Penelitian.....	61
4.7.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	61
4.7.2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	62
4.7.3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	64
4.7.4. Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	65
BAB V.....	68
PENUTUP.....	68
5.1. Kesimpulan.....	68
5.2. Implikasi.....	69
5.3. Keterbatasan Penelitian	69
5.4. Agenda Penelitian Mendatang.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	75

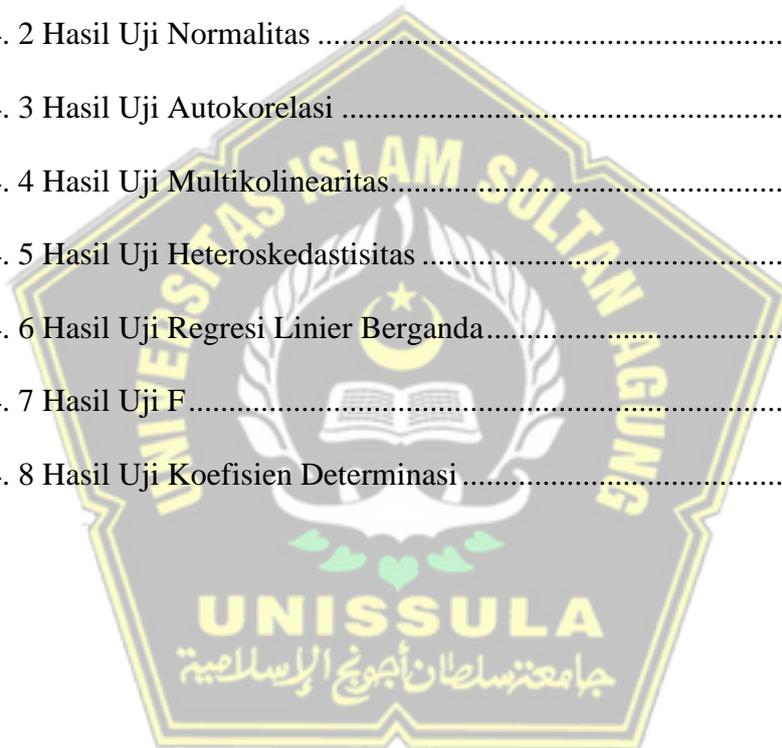
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian Teoritis.....	37
---	----



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi	4
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	24
Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	40
Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas	52
Tabel 4. 3 Hasil Uji Autokorelasi	52
Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	53
Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas	55
Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda.....	56
Tabel 4. 7 Hasil Uji F.....	58
Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi.....	59



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah adalah sistem yang dikenal memberikan kepada daerah kewenangan dan keleluasaan untuk mengelola dan mengurus pemerintahannya sendiri. UU No. 23 Tahun 2014 menetapkan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan demokrasi, pelayanan publik, efektivitas dan efisiensi pemerintahan, dan kesejahteraan masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah harus efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan adil, karena merupakan komponen penting dari penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia. Karena tidak dapat mengawasi perkembangan setiap wilayah secara menyeluruh, pemerintah pusat menetapkan kebijakan otonomi sejalan dengan anggaran daerah, peningkatan proses pembangunan ekonomi setelah penerapan kebijakan otonomi, dan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien (Ardelia et al., 2022). Keuangan daerah yang baik menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya juga.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap daerah dapat menunjukkan pengelolaan keuangan mereka. APBD ini dapat digunakan untuk membuat peraturan pembangunan daerah untuk pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kunci keberhasilan dan kesuksesan pembangunan. Setiap daerah di Indonesia harus melakukan pengelolaan keuangan, yang merupakan komponen yang sangat penting. Pembangunan dan penyelenggaraan

pemerintah daerah dapat dicapai dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik dan optimal, yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah.

Pembangunan daerah sendiri merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Untuk mendukung pertumbuhan dan kemajuan mereka, pemerintah daerah diharapkan memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Meskipun pemerintah telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan pengelolaan keuangan daerah yang baik, desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pelaksanaan desentralisasi.

Kinerja keuangan daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pertama adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD adalah penerimaan daerah yang berasal dari wilayahnya sendiri dan dipungut sesuai dengan undang-undang yang berlaku (B. I. Sari & Halmawati, 2021). Kinerja keuangan sangat dipengaruhi oleh PAD. PAD memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap APBD jika pemerintah daerah tidak bergantung pada bantuan pemerintah pusat. Secara umum, Pendapatan Asli Daerah Jawa Tengah telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin bersemangat untuk menemukan sumber pendapatan baru dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan retribusi. Dengan jumlah PAD yang sangat terbatas, PAD seharusnya merupakan sumber pendapatan utama yang berkontribusi terhadap kinerja keuangan daerah. Namun, untuk membiayai berbagai kegiatan yang meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, diperlukan dana yang

besar, dan pemerintah daerah membutuhkan dana tambahan di luar PAD. Salah satu sumber dana tersebut adalah dana yang berasal dari bantuan pemerintah pusat (Zukhri, 2020). Namun, perlu dicatat bahwa PAD di Jawa Tengah sangat bervariasi antara kabupaten dan kota. Beberapa daerah masih dianggap sebagai daerah otonomi khusus (DOK) dengan tingkat rasio keuangan yang rendah. Penelitian yang dilakukan oleh (Ardelia et al., 2022) menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah memiliki hubungan yang positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang berbeda oleh (Azhar, 2021) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 2 Tahun 2011, belanja modal adalah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah sebagai bagian dari pembentukan modal dan dianggap sebagai penambahan aset tetap atau inventaris yang tersedia selama lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal dilakukan pemerintah daerah untuk menyediakan layanan kepada masyarakat, yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Pada tahun 2020, belanja modal sedikit tertahan dari 92,02% menjadi 89,91% karena aktivitas konstruksi dan pembangunan infrastruktur yang terbatas untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Namun, pada tahun 2021, anggaran belanja modal tumbuh sebesar 52,27%, yang merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi pada tahun 2021 setelah anggaran pada komponen belanja ini mengalami kerugian pada tahun sebelumnya.

Pemerintah daerah harus memaksimalkan anggaran belanjanya dan meningkatkan kinerjanya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat. Infrastruktur yang baik akan meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah, dan masyarakat yang sejahtera akan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerahnya baik. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah Jawa Tengah telah mengalokasikan anggaran yang signifikan untuk belanja modal. Diharapkan belanja modal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh (Ramadana & Bahgia, 2023) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan oleh (Amin Insani et al., 2023) menunjukkan bahwa Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Tabel 1. 1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tahun	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	-2,65
2021	3,33
2022	5,31
2023	5,23

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2020 adalah tahun di mana COVID-19 mulai menyebar dan mempengaruhi kondisi ekonomi dan sosial di seluruh dunia. Kondisi ini menjadi salah satu bukti bahwa pandemi COVID-19 memberi dampak lebih besar pada

ekonomi Jawa Tengah dan Nasional dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya. Namun, perekonomian Jawa Tengah meningkat sebesar 3,32% selama tiga bulan pertama tahun 2021, jauh lebih baik dari 2,65% di tahun 2020. Kemudian tahun 2022 perekonomian meningkat lebih besar menjadi 5,31% menunjukkan tren positif yang berlanjut. Memasuki tahun 2023, pada triwulan II, pertumbuhan tercatat sebesar 5,23%, sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya tetapi masih lebih tinggi dari pertumbuhan nasional yang mencapai 5,17%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah harus dievaluasi. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi telah menurun, yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan tidak optimal, yang menghasilkan hasil yang tidak memuaskan. Manajemen keuangan daerah harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian masyarakat.

Kinerja keuangan Pemerintah Daerah juga dipengaruhi oleh dana perimbangan. Penghasilan daerah yang berasal dari APBN, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dikenal sebagai dana perimbangan. Menurut PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, DAU adalah dana yang diperoleh dari pendapatan APBN dan dialokasikan untuk mendanai kebutuhan daerah yang digunakan untuk pelaksanaan. Dana Alokasi Khusus (DAK) memengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang memadai untuk kepentingan umum. DAK meningkatkan kinerja keuangan. Jika DAK diberikan kepada Pemerintah Daerah semakin besar, pembiayaan urusan daerah akan menjadi lebih baik. Ini akan menghasilkan

manifestasi keuangan yang lebih baik karena dana yang diawasi oleh Pemerintah Daerah akan semakin besar. Penelitian yang dilakukan oleh (Ariska, 2022) menunjukkan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Namun, penelitian berbeda yang dilakukan oleh (Ardelia et al., 2022) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh negative terhadap Kinerja Keuangan.

Opini audit merupakan pernyataan profesional dari BPK tentang kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Opini audit juga didasarkan pada kriteria seperti kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kecukupan pengungkapan. Opini audit juga merupakan hasil dari tinjauan informasi LKPD yang lengkap atau telah diperiksa secara menyeluruh (Rasyid et al., 2022). Opini audit dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas entitas pemerintah. Opini audit membantu pemakai laporan keuangan menilai keberlangsungan hidup bisnis, resiko investasi, dan kewajaran kegiatan operasi. Jika informasi diberikan secara akurat, tanpa keraguan, dan secara menyeluruh, maka informasi tersebut dapat dianggap wajar.

Dalam rangka menjamin kinerja keuangannya, pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), yang kemudian diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK akan menghasilkan opini audit dan temuan audit. Opini audit dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas entitas serta akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan. Pemberian opini WTP oleh BPK menjadi parameter bahwa suatu pemerintahan menunjukkan performa keuangan yang baik dan mematuhi regulasi yang berlaku.

Pada tahun 2020 BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion* kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Meskipun mempertahankan WTP, namun ada beberapa masalah yang harus ditangani ketiga pemkab, antara lain pengelolaan pendapatan yang buruk pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Blora. Pengelolaan aset tetap Pemkab Karanganyar TA 2020 tidak optimal karena dimanfaatkan oleh pihak lain yang tidak memiliki perjanjian. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Boyolali menerima pembayaran tambahan untuk enam paket pekerjaan. Kemudian tahun 2021 sampai 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerima opini WTP selama 12 kali berturut-turut.

Dengan memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) pemerintah daerah Jawa Tengah menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kinerja keuangan. Namun demikian, masih ada beberapa masalah yang menghalangi pencapaian opini WTP BPK secara konsisten. Ini termasuk sistem pengendalian internal yang buruk, kurangnya kemampuan sumber daya manusia di bidang akuntansi dan keuangan, dan kurangnya koordinasi antara SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Penelitian yang dilakukan oleh (Az Zahrah et al., 2024) menunjukkan bahwa Opini audit berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Studi yang berbeda oleh Wijayanti & Suryandari (2020) dimana hasil penelitiannya memperlihatkan opini audit BPK memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah adalah proses evaluasi sistematis tentang seberapa efektif dan efisien pengelolaan keuangan daerah dalam mencapai tujuan. Ini dilakukan dengan menggunakan indikator keuangan yang relevan dan dapat diukur. Terdapat indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Rasio Belanja Modal terhadap APBD, Rasio Sisa Anggaran Belanja Modal (Siskeb) terhadap Belanja Modal, Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK, Tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan Tingkat kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang meliputi faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah topik yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, karena segala hal yang berkaitan dengan keuangan dinilai sensitif untuk dikaji lebih dalam. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang diteliti (Endri & Dini, 2020) yang meneliti mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta. Peneliti menambahkan variabel dana perimbangan seperti yang diteliti oleh (Digdowiseiso et al., 2022) untuk menguji dan menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan perbedaan lain adalah penelitian ini berfokus pada kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah periode anggaran 2020-2023. Berdasarkan data laju pertumbuhan ekonomi yang masih berfluktuasi menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masih perlu banyak dievaluasi karena sesuai data yang ada terkadang mengalami penurunan yang dimana hal ini menjadi salah satu tolak ukur

kurang optimalnya pengelolaan keuangan yang menciptakan kinerja keuangan yang kurang memuaskan.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian terdahulu mengenai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan pada pemerintah daerah maka dapat diketahui bahwa pengaruh dari PAD, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Opini Audit BPK belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang konsisten. Berdasarkan review dari berbagai penelitian terdahulu yang telah dilakukan maka dapat diketahui bahwa terdapat celah (*gap*) dalam hasil tersebut. Dimana hasil penelitian belum menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Inilah yang membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali pengaruh variabel PAD, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Opini Audit BPK mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan *research gap* dan fenomena yang dikemukakan diatas, permasalahan yang ada berkaitan dengan inkonsistensi yang ditemukan dalam temuan penulisan mengenai pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, serta opini audit BPK, sebagai faktor penentu kinerja keuangan pemerintah daerah. Dalam variabel yang dikemukakan ada berpengaruh signifikan ada yang tidak berpengaruh serta ketidakkonsistenan ini menyoroti adanya variasi dalam hasil penelitian yang mungkin disebabkan oleh perbedaan dalam objek penelitian. Penelitian ini difokuskan secara khusus pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah?”

1.3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas maka dapat disimpulkan bahwa pertanyaan penelitian pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah?
2. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah?
3. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah?
4. Apakah Opini Audit BPK berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan dari rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan opini audit BPK

1. Untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah.
2. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah.
4. Untuk menganalisis pengaruh Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah.

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebuah pengembangan suatu ilmu pengetahuan mengenai kinerja keuangan pemerintah daerah dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya serta dapat menghasilkan bukti empiris dalam menilai manifestasi keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai acuan dalam penelitian selanjutnya dengan pembahasan yang sama.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti tentang langkah-langkah menganalisa informasi keuangan pada anggaran pendapatan dan belanja modal.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan bagi masyarakat guna memahami bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Daerah, sehingga masyarakat bisa berpartisipasi dan bebas berpendapat serta memberikan

masukan dan kritik serta saran yang membangun Pemerintah Daerah untuk memperbaiki manifestasi keuangan dan kualitas pelayanan publik agar lebih berkualitas.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dalam memberikan penilaian dan memantau kinerja keuangan dalam kurun waktu tertentu, sehingga dapat termotivasi dan tergugah untuk terus melakukan peningkatan kinerja keuangan dan pelayanan yang lebih baik untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Grand Theory

2.1.1. Teori Agensi

Konsep yang dibahas dalam penelitian ini didasarkan pada teori keagenan, juga dikenal sebagai teori agensi. Teori keagenan menjelaskan hubungan antara pemberi kuasa (*principal*) dan orang yang diberi kuasa (*agent*) yang bekerja sama untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Teori ini berasumsi bahwa setiap orang dimotivasi oleh kepentingannya sendiri, sehingga dapat terjadi konflik kepentingan. Dalam teori ini, agensi bertindak sebagai manajemen, dan prinsipal bertindak sebagai pemilik (Harianto & Aini, 2021). Dalam konteks kinerja pemerintah menjelaskan hubungan antara pemerintah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal*. Dalam hubungan ini, masyarakat memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya dan memberikan pelayanan publik.

Teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas, di mana pemerintah harus mempertanggungjawabkan semua aktivitas dan keputusan yang diambil kepada masyarakat yang diwakili oleh legislatif sebagai agen, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk bertindak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Namun, sering kali terdapat asimetri informasi, di mana agen memiliki akses lebih besar terhadap informasi dibandingkan dengan prinsipal. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpercayaan dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah, sehingga

diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa pemerintah bertindak transparan dan akuntabel.

Dalam penelitian ini, dari sisi masyarakat (*principal*) merasa kurang puas dengan hasil yang dicapai oleh pemerintah daerah (*agent*). Dari sisi pemerintah daerah (*agent*) kurang memperhatikan kepentingan masyarakat umum (*principal*) melainkan mementingkan kesejahteraannya sendiri. Bentuk dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan kinerjanya melalui laporan keuangan setiap periodenya sebagai pengungkapan informasi kepada publik untuk mengurangi *agency cost*.

Relevansi antara teori keagenan dengan kinerja keuangan dapat dilihat dari adanya peran pengelolaan keuangan pemerintah daerahnya. Dalam mengelola keuangan daerahnya, pemerintah daerah hendak memiliki sumber-sumber keuangan melalui pendapatan asli daerah dan belanja modal serta memperhatikan dana perimbangan dalam menilai kinerja keuangan. Bentuk dari tanggungjawab pemerintah daerah dalam memenuhi kewajibannya yaitu melaporkan performanya dengan laporan keuangan tiap periodenya. Kemudian diaudit oleh BPK untuk menilai kewajaran laporan keuangannya.

2.2. Variabel Penelitian

2.2.1 Kinerja Keuangan

Berdasarkan pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan

daerah. Menurut (Amin Insani et al., 2023) definisi kinerja keuangan pemerintah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan dan mengelola sumber daya keuangan lokal untuk memenuhi kebutuhan dan mendukung berlangsungnya sistem pemerintahan, layanan publik, dan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Pengelolaan Keseluruhan proses pengelolaan tersebut harus saling terintegrasi, berkaitan, dan dijalankan dengan sebaik mungkin untuk bisa mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik.

2.2.1.1. Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pengukuran kinerja keuangan adalah metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarkan tujuan, sasaran, dan strategi. Sistem pengukuran kinerja modern tidak hanya menilai input dan output tetapi juga menilai tingkat fleksibilitas organisasi dalam melayani pelanggan. Pandangan tradisional tentang pengukuran kinerja organisasi sering fokus pada penghematan biaya (*input*), misalnya dengan mengurangi biaya operasional. Pandangan modern harus digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Beberapa rasio untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah menurut (Hafizi & Amalia, 2022) sebagai berikut:

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian keuangan daerah merupakan suatu gambaran pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur urusan pemerintahannya dengan menggunakan keuangannya sendiri tanpa bantuan pihak eksternal.

2. Rasio Efektivitas Keuangan Daerah

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam merealisasikan APBD yang direncanakan dan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi nyata daerah. Artinya, rasio ini merupakan hasil perbandingan antara APBD yang terealisasi dengan APBD yang ditargetkan.

3. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara output dan input atau realisasi pengeluaran dengan realisasi penerimaan daerah. Semakin kecil rasio ini, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Pengukuran kinerja pemerintah daerah dapat diukur dengan menilai efisiensi atas pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat.

4. Rasio Aktivitas (Keserasian Belanja Daerah)

Rasio aktivitas (Keserasian Belanja Daerah) adalah rasio keuangan daerah yang menggambarkan bagaimana Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.

5. Derajat Desentralisasi Fiskal

Derajat Desentralisasi Fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri.

6. Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas (hasil guna) merupakan ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam usaha mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dan output. Berdasarkan hal tersebut maka perlu dilakukan pengukuran untuk mengetahui tingkat keberhasilan pengumpulan pajak daerah, dalam hal ini dengan menggunakan rasio efektivitas yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi sesungguhnya yang ada di daerah.

7. Rasio Pertumbuhan

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya, dan dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, sehingga dapat untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian. Rasio pertumbuhan dilihat dari pendapatan asli daerah, total pendapatan, belanja rutin (belanja operasi), belanja pembangunan (belanja modal).

2.2.1.2. Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Indikator kinerja dapat digunakan untuk menentukan tingkat keberhasilan pelaksanaan program pekerjaan internal pemerintah daerah. Tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan diukur melalui pengukuran kuantitatif dan kualitatif yang dikenal sebagai indikator kinerja. Analisis rasio keuangan adalah analisis yang menggunakan metode perhitungan untuk mengukur seberapa sukses

manajemen keuangan suatu organisasi, instansi, atau organisasi selama periode waktu tertentu. Pada penelitian ini pengukuran kinerja keuangan daerah menggunakan analisis rasio efektivitas. Untuk mengukur seberapa efektif pemerintah daerah dalam mengumpulkan PAD dibandingkan dengan target yang ditetapkan, dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

2.2.2. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 20 UU No. 1 Tahun 2022, pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh sumber yang berwenang termasuk dalam pendapatan asli daerah. Pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut secara hukum (Azhar, 2021). Definisi pendapatan aslin daerah menurut (N. M. D. P. Sari & Mustanda, 2019) komponen penting yang ada di daerah yang akan digunakan untuk membiayai semua program yang direncanakan pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari sumber daya di wilayahnya yang dipungut sesuai dengan peraturan dan kebijakan pemerintah. Semua hak daerah yang dianggap meningkatkan nilai ekonomi daerah dianggap sebagai pendapatan asli daerah.

2.2.2.1. Pembagian Pendapatan Asli Daerah

Dengan menerapkan desentralisasi, pemerintah daerah memiliki kesempatan untuk memaksimalkan potensi mereka untuk memperoleh PAD yang tinggi. PAD adalah semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, dan dibagi menjadi empat kategori pendapatan, yaitu:

1. Pajak Daerah, berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh badan kepala daerah dan orang pribadi tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipisahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan Pembangunan daerah.
2. Retribusi daerah adalah pungutan daerah yang dimaksudkan untuk membayar jasa atau izin khusus yang diberikan atau diberikan oleh pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan retribusi daerah adalah pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah.
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ini merupakan hasil yang diterima daerah dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
4. Lain-lain PAD yang sah, yang merupakan pendapatan yang diterima oleh daerah dari sumber daya lain yang dimiliki pemerintah daerah.

2.2.3. Belanja Modal

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang menambah aset tetap atau inventaris dan memberikan keuntungan selama lebih dari satu

periode akuntansi. Ini termasuk biaya pemeliharaan yang bertujuan untuk mempertahankan kapasitas dan kualitas aset. Adapun klasifikasi belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

2.2.3.1. Jenis-jenis Belanja Modal

Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat lima kategori belanja modal. Diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Belanja Modal Tanah

Belanja modal atas tanah merupakan biaya yang dikeluarkan untuk perolehan, pelepasan, penyelesaian, pengalihan nama dan penyewaan tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pemasakan lahan, penyiapan sertifikat dan berbagai biaya lain sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang bersangkutan dalam keadaan baik penggunaan.

2. Belanja Modal Untuk Peralatan dan Mesin

Belanja modal untuk peralatan dan mesin merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk perolehan, penambahan atau penggantian dan penambahan dalam kapasitas peralatan dan mesin yang dapat memberikan manfaat lebih dari dua belas bulan sampai peralatan dan mesin terkait digunakan.

3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Biaya Gedung dan bangunan adalah biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan, pengawasan, dan pengarahannya pekerjaan teknik sipil yang meningkatkan kapasitas hingga bangunan dan konstruksi siap digunakan.

4. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan, pengawasan, pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang meningkatkan kapasitas hingga siap digunakan.

5. Belanja Modal Fisik Lainnya

Biaya modal fisik lainnya adalah biaya yang dikeluarkan yang tidak termasuk dalam kriteria konstruksi untuk tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan fasilitas, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Belanja modal fisik lainnya termasuk kontrak sewa beli, pembelian karya seni, barang antik, benda museum, ternak, tanaman, buku, dan karya ilmiah.

2.2.4. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah sistem hubungan keuangan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Ini terjadi karena otonomi daerah diberikan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. UU Nomor 33 Tahun 2004 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2.2.4.1 Jenis-jenis Dana Perimbangan

Dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 10 menyebutkan bahwa Dana Perimbangan terdiri atas Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

1. Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) diartikan sebagai dana yang berasal dari APBN. DBH dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu guna membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan pemerintah daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004, sumber DBH terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Pemerintah menetapkan alokasi DBH yang berasal dari sumber daya alam sesuai dengan daerah penghasil dan penetapan dasar perhitungan. DBH merupakan hak daerah yang dihasilkan masing-masing daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan, yang besarnya ditentukan menurut perundang-undangan yang berlaku atas daerah.

2. Dana Alokasi Umum

DAU adalah salah satu dana perimbangan dari pemerintah daerah yang dialokasikan dengan tujuan menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014.

3. Dana Alokasi Khusus

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004, DAK adalah dana yang berasal dari pendapatan dalam APBN yang diberikan kepada daerah tertentu sebagai bantuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah serta sesuai dengan prioritas nasional. Selanjutnya berdasarkan UU yang sama mengenai Perimbangan Keuangan dan Daerah, termuat penjelasan mengenai DAK yang diartikan sebagai dana yang berasal dari pendapatan dalam APBN yang diberikan kepada daerah untuk membantu daerah dalam mendanai kebutuhan tertentu. DAK diperuntukkan guna menutupi kesenjangan pelayanan publik antar

daerah dengan memberikan prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah, serta lingkungan hidup.

2.2.5. Opini Audit BPK

Opini audit adalah pernyataan yang dibuat oleh pemeriksa sebagai kesimpulan tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Andani et al., 2019). Opini audit ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Negara. Berikut ini adalah empat jenis opini audit BPK.

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*Unqualified Opinion*)

Opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dapat diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal yang memadai dan tidak terdapat kesalahan material pada unsur-unsur laporan keuangan. Dengan demikian, secara umum laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai SAP.

2. Opini Wajar dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*)

Opini wajar dengan pengecualian (WDP) dapat diberikan dengan kriteria sistem pengendalian internal yang memadai, tetapi terdapat kesalahan material pada beberapa unsur laporan keuangan. Laporan keuangan dengan opini WDP dapat diandalkan. Namun, pemangku kepentingan harus memperhatikan hal-hal yang dikemukakan oleh auditor agar tidak mengambil keputusan yang tidak tepat.

3. Opini Tidak Wajar (TW/*Adversed Opinion*)

Opini tidak wajar (TW) diberikan jika pengendalian internal tidak memadai dan terdapat banyak kesalahan material pada unsur-unsur laporan keuangan. Oleh karena itu, secara umum laporan keuangan tidak disajikan secara wajar menurut SAP.

4. Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP/*Disclaimer of Opinion*)

Opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP) diberikan apabila terdapat suatu nilai yang tidak dapat dipercaya secara material oleh auditor karena adanya pembatasan ruang lingkup pemeriksaan oleh manajemen yang mengakibatkan auditor tidak memiliki cukup bukti. Bisa juga karena sistem pengendalian internal yang sangat lemah.

2.3. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang pengaruh pendapatan asli daerah, belanja modal dan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Objek Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil
1.	(Azhar, 2021)	Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah (BPKD) Kota Langsa yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2011 sampai 2020	Y: Kinerja Keuangan Pemerintah X: Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

				Daerah Kota Langsa.
2.	(Harty et al., 2023)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten Sukka tahun 2016 sampai 2020	Y: Kinerja Keuangan X: Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (X) berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan (Y).
3.	(Edwar et al., 2023)	Laporan Realisasi APBD Pemerintah Daerah di Kota Bandung	Y: Kinerja Keuangan X: Pendapatan Asli Daerah	PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan
4.	(H. M. Sari et al., 2021)	Badan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kerinci	Y: Kinerja Keuangan X: Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Aslin Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.
5.	(Maulina et al., 2021)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara	Y: Kinerja Keuangan X: Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan positif
6.	(Ariska, 2022)	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara	Y: Kinerja Keuangan X: Belanja Modal	Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Badan Pegelolaan Keuaangan dan Aset Daerah pada Provinsi Sumatera Utara

7.	(Ardelia et al., 2022)	Laporan Keuangan Pemerintah Kota dan Kabupaten dari eks Karesidenan Pekalongan	Y: Kinerja Keuangan X: Belanja Modal	Belanja Modal tidak memiliki hubungan signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah
8.	(Digdowiseiso et al., 2022)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Y: Kinerja Keuangan X: Belanja Modal	Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015-2019
9.	(Wahyudin & Hastuti, 2020)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat	Y: Kinerja Keuangan X: Belanja Modal	Belanja Modal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018

10.	(B. I. Sari & Halmawati, 2021)	Laporan Realisasi APBD Provinsi Sumatera Barat	Y: Kinerja Keuangan X: Belanja Modal	Belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
11.	(Al-lintangi et al., 2023)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah	Y: Kinerja Keuangan X: Dana Perimbangan	Dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Tengah
12.	(Haque & Rohman, 2022)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Jawa Tengah	Y: Kinerja Keuangan X: Dana Perimbangan	Dana perimbangan berpengaruh positif namun tidak signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah
13.	(Fernandes & Hilwani, 2021)	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Sumatera Barat	Y: Kinerja Keuangan X: Dana Perimbangan	Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan. Berpengaruh negatifnya Dana Perimbangan terhadap Kinerja

				Keuangan ini menjelaskan bahwa jika Dana Perimbangan meningkat berarti Kinerja Keuangan mengalami penurunan.
14.	(Suandani et al., 2021)	Laporan Realisasi Anggaran Provinsi Bali	Y: Kinerja Keuangan X: Opini Audit	Opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
15.	(Rasyid et al., 2022)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau	Y: Kinerja Keuangan X: Opini Audit	Opini audit berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah daerah
16.	(Endri & Dini, 2020)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi D.I Yogyakarta	Y: Kinerja Keuangan X: Opini Audit	Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah
17.	(Az Zahrah et al., 2024)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur	Y: Kinerja Keuangan X: Opini audit	Opini Audit berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur

18.	(Amin Insani et al., 2023)	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi	Y: Kinerja Keuangan X: Opini Audit	Opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
-----	----------------------------	---	---	--

2.4. Kerangka Penelitian Teoritis & Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan

Pendapatan asli daerah dapat diukur melalui total PAD yang diperoleh dalam periode tertentu, kemudian dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk melihat pertumbuhannya memengaruhi kinerja keuangan. PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kinerja keuangan daerah yang baik yaitu apabila semakin besar kontribusi daerah yang dihasilkan dari potensi yang ada pada daerah sendiri akan memiliki dampak pada kenaikan pendapatan daerah.

Menurut teori keagenan, pemerintah daerah sebagai agen mengelola keuangannya yang bersumber dari masyarakat atau prinsipal untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang akan membantu mereka mencapai tujuan organisasinya. Masyarakat dapat melakukan kontrol atas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah yang dapat mengelola keuangannya secara efektif dapat mencapai tujuan organisasinya. Sebab, pemerintah daerah yang memperoleh pendapatan asli daerah tinggi dan pasti

enggannya mengandalkan dana dari APBD dikarenakan minimnya tingkat ketergantungan untuk mendanai semua kegiatan operasionalnya sehingga akan meningkatkan status keuangannya dan menjadikan kinerja keuangan pemerintah daerah semakin bagus (Dwigantara & Handayani, 2020).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (H. M. Sari et al., 2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Kinerja Keuangan. Karena peningkatan PAD mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sehat. PAD yang baik cenderung lebih mampu mengatasi tantangan finansial. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

2.4.2. Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

Belanja modal merupakan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah. Semakin besar persentase alokasi belanja modal menandakan bahwa pemerintah daerah lebih produktif dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya. Oleh karenanya, penggunaan aset yang dihasilkan selalu bersinggungan dengan pelayanan publik dan digunakan oleh masyarakat umum. Belanja modal diukur berdasarkan total belanja modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Belanja Aset Tetap Lainnya. Total belanja tersebut diperoleh dari periode tertentu

kemudian dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk melihat pertumbuhan yang memengaruhi kinerja keuangan.

Keterkaitan teori keagenan dengan belanja modal, pengelolaan aset-aset yang ada, termasuk penggunaan belanja modal yang dianggarkan yang dapat berupa sarana dan prasarana unggulan bagi masyarakat sehingga dapat dirasakan pemerintah daerah perlu mengelola aset-aset tersebut berisiko karena dana yang diperoleh dari manajemen. Agen (pemerintah) yang didelegasikan untuk belanja modal harus bertanggung jawab dan menangani tugas pemeliharaan aset tetap. (Maulina et al., 2021) berpendapat bahwa potensi ini harus dimaksimalkan melalui penggunaan yang tepat. Hal ini akan mengarah pada peningkatan layanan publik, yang pada gilirannya akan menghasilkan hasil kinerja keuangan yang unggul. Semakin besar pengeluaran yang diperoleh dari belanja modal untuk pembangunan yang nilai manfaatnya berdampak pada penambahan pendapatan daerah, maka akan menjadikan keuangan daerah bagus karena dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Digdowiseiso et al., 2022) menyatakan bahwa belanja modal memiliki hubungan yang positif signifikan pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Semakin tinggi Belanja Modal yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah, maka akan semakin tinggi juga Kinerja Keuangan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah. Tingginya Belanja Modal yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah akan berdampak pada peningkatan fasilitas dan potensi daerah yang kemudian akan meningkatkan penerimaan daerah serta

mendorong tercapainya Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H2: Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

2.4.3. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

Dana perimbangan dari pendapatan APBN diberikan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah (UU No.33 Tahun 2004). Jika belanja daerah lebih besar daripada penerimaan daerah, akan ada defisit. Akibatnya, pemerintah daerah menerima dana perimbangan sebagai kiriman atau transfer dari pemerintah pusat untuk menutup kekurangan belanja daerah. Tujuan dari dana perimbangan adalah untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah sehingga setiap daerah memiliki kemampuan yang sebanding dalam mengelola pemerintahan dan pelayanan publik. Dana perimbangan diukur berdasarkan total dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Total dana tersebut diperoleh dari periode tertentu kemudian dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk melihat pertumbuhan yang memengaruhi kinerja keuangan.

Berdasarkan teori keagenan, peran pemerintah pusat (*principal*) memberikan kewenangan, yaitu memberikan kebebasan untuk mengatur tindakan, kepada pemerintah daerah (*agent*). Oleh karena itu, besarnya dana perimbangan menunjukkan bahwa pemerintah daerah (*agent*) sangat bergantung pada pemerintah pusat (*principal*), yang dapat mengakibatkan penurunan kinerja keuangan.

Berdasarkan penelitian dari (Wahyudin & Hastuti, 2020) menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2014-2018. Dana Perimbangan untuk kegiatan pembangunan daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Kinerja Keuangan Daerah meningkat. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3: Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan

2.4.4. Pengaruh Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan

Ukuran opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Indonesia terhadap laporan keuangan pemerintah menggunakan empat kriteria yaitu Pendapat Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), Pendapat Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), Pendapat Tidak Wajar (*Adverse Opinion*), dan Menolak Memberikan Pendapat (*Disclaimer Opinion*) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP). Opini audit mempengaruhi tingkat kewajaran informasi, sehingga dapat digunakan sebagai ukuran untuk menilai akuntabilitas pemerintah. Opini audit bagi *stakeholders* dapat menambah ataupun menurunkan *level of confidence*, dari *reporting* yang telah disajikan oleh pihak yang diaudit, dalam hal ini entitas *government*.” Semakin baik opini audit yang diperoleh, maka semakin baik kinerja pemerintah (Andani et al., 2019). Pemerintah daerah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya setelah menerima opini audit yang baik. Ini akan mendorong partisipasi aktif dalam program pemerintah. Pemerintah daerah juga dapat memperbaiki pengelolaan anggaran dan penggunaan sumber daya dengan umpan balik BPK.

Keterkaitan teori agensi dengan opini audit adalah masyarakat sebagai prinsipal yang memiliki kepentingan terhadap pengelolaan keuangan, sedangkan pemerintah atau pejabat publik bertindak sebagai agen terus berupaya menerapkan pengelolaan keuangan dengan baik dan senantiasa memberikan pertanggungjawaban sehingga memperoleh opini audit yang baik. Opini audit pemerintah daerah yang semakin baik akan membuat masyarakat menjadi lebih percaya dengan pemerintah untuk mengelola keuangan pemerintah daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Suandani et al., 2021) menyatakan bahwa opini audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini audit merupakan wujud akuntabilitas pemerintah daerah yang dapat dinilai oleh publik yaitu semakin baik opini audit maka semakin baik kinerja pemerintah daerah tersebut (Rasyid et al., 2022). Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H4: Opini Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan

2.5. Kerangka Penelitian Teoritis

Kerangka pemikiran digunakan untuk menggambarkan hubungan pengaruh antara variabel satu dengan variabel lain yang akan ditelaah peneliti. Hubungan tersebut akan peneliti uraikan dan gambarkan dalam kerangka pemikiran pada gambar dibawah ini Dimana pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Opini Audit. Sedangkan variabel dependennya adalah Kinerja Keuangan.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memberikan ruang kemandirian bagi daerah maka pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menggali sumber pendapatan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya dalam hal ini yaitu pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004). Semakin bagus infrastruktur baik dalam sarana maupun prasarana yang berhasil dibangun oleh pemerintah daerah melalui Pendapatan Asli Daerahnya, maka daerah tersebut sudah dapat dikatakan makmur. Jika suatu daerah dapat dikatakan sudah makmur dengan dilihat dari beberapa pencapaian kinerja pemerintahnya, artinya penilaian kinerja keuangan pada pemerintah daerah pun akan semakin baik. Semakin tinggi pendapatan asli daerah (PAD) maka semakin rendah rasio ketergantungan keuangan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat, yang mengindikasikan bahwa semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut (Hafizi & Amalia, 2022).

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud, antara lain Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Belanja Aset Tetap Lainnya, Belanja Aset Lainnya. Dimana masa manfaat dari belanja modal ini minimal dirasakan selama 12 bulan atau satu periode akuntansi. Belanja modal untuk mempercepat perputaran ekonomi demi kesejahteraan masyarakat dan

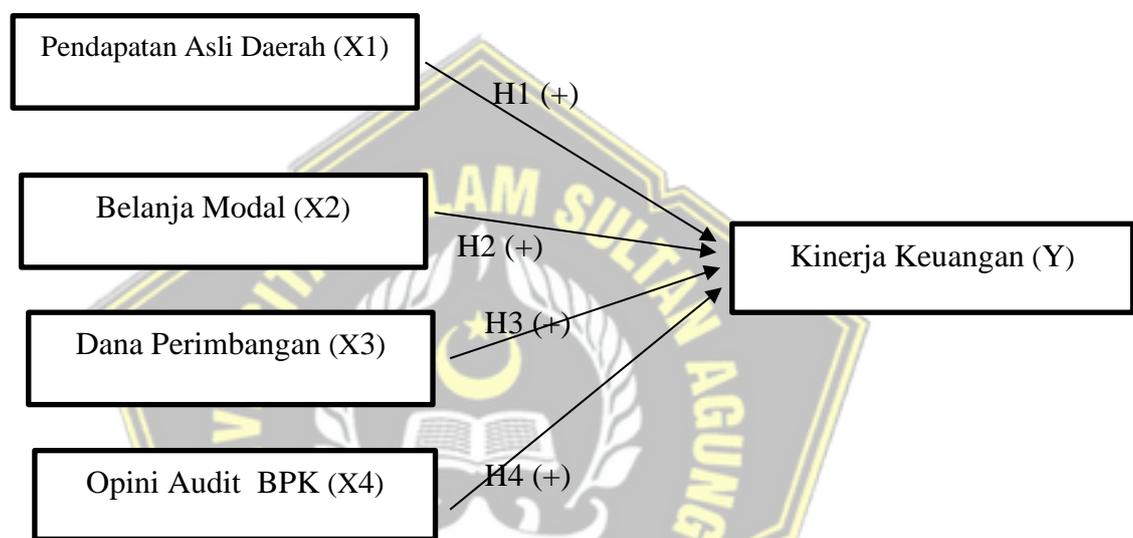
meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mendorong peningkatan pendapatan asli daerah pada daerah itu sendiri, karena masyarakatnya sejahtera yang menghasilkan kinerja keuangan pemerintah daerahnya meningkat. Apabila pemerintah daerah menganggarkan belanja modalnya tinggi maka diharapkan kinerjanya akan semakin baik (Digidowiseiso et al., 2022).

Dana Perimbangan adalah salah satu bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dana perimbangan, sebagai salah satu sumber pendapatan, memainkan peran yang sangat penting dalam pelaksanaan keuangan daerah. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua daerah memiliki potensi yang sama untuk memaksimalkan pendapatan asli mereka. Oleh karena itu, dana perimbangan dapat berfungsi sebagai sumber dana tambahan bagi daerah. Sumber daya keuangan daerah akan meningkat seiring dengan peningkatan dana perimbangan, yang akan meningkatkan kinerja keuangan daerah (Maulina et al., 2021).

Opini audit yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki dampak signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena opini tersebut mencerminkan tingkat kepatuhan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran, serta dapat mempengaruhi kepercayaan publik dan investor terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien. Opini audit yang lebih baik akan meningkatkan legitimasi masyarakat terhadap pemerintah daerah karena masyarakat akan lebih percaya atas kredibilitas pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Atas kepercayaan yang semakin

meningkat tersebut maka mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui pembayaran PAD, khususnya pajak dan retribusi daerah (Suandani et al., 2021).

Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Penelitian Teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian eksplanasi (*explanatory research*) dimana digunakan untuk menguji suatu hubungan antar variabel atau mengetahui apakah suatu variabel berhubungan atau tidak dengan variabel lainnya, atau untuk mengetahui apakah suatu variabel disebabkan atau dipengaruhi atau tidak oleh variabel lainnya. Maka dapat diharapkan dari penelitian ini dapat menjelaskan hubungan dan pengaruh antara variabel bebas dan terikat yang ada didalam hipotesis.

3.2. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan 35 kota dan kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang telah di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

3.3. Sampel

Metode sampling yang digunakan pada penelitian ini yakni sampling total/sensus. Metode sensus sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Sampel pada penelitian ini adalah Laporan Keuangan pada 35 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Tengah.

3.4. Sumber dan Jenis Data

Sumber data pada penelitian merupakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah dan Laporan

Hasil Pemeriksaan Provinsi Jawa Tengah sebanyak 35 kota dan kabupaten periode 2020-2023.

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian kuantitatif karena data yang digunakan untuk menganalisa berupa angka-angka untuk menguji seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dokumentasi. Metode ini berupa mencatat, mengelompokkan dan mengolah hasil yang berhubungan dengan penelitian kuantitatif. Metode pengumpulan data ini digunakan guna mendapatkan data terkait *website* resmi BPS untuk LRA. Sedangkan untuk Opini Audit diperoleh dari *website* BPK Perwakilan Jawa Tengah.

3.6. Variabel, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen disebut juga variabel bebas merupakan variabel yang menjadi pengaruh perubahan variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat merupakan variabel yang menjadi akibat dari pengaruh variabel independen. Variabel dalam penelitian ini yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (Variabel Independen)
2. Belanja Modal (Variabel Independen)
3. Dana Perimbangan (Variabel Independen)
4. Opini Audit BPK (Variabel Independen)
5. Kinerja Keuangan (Variabel Dependen)

3.6.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Tabel 3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

No	Variabel	Definisi Konsep dan Sumber	Pengukuran	Skala
1.	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah.	Pendapatan Asli Daerah = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan + Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Sumber Undang-undang nomor 23 tahun 2014	Rasio
2.	Belanja Modal	Belanja modal merupakan belanja yang bersumber dari anggaran pada pemerintah daerah.	Belanja Modal = Belanja Tanah + Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Gedung dan Bangunan + Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya Sumber (Digdowiseiso et al., 2022)	Rasio
3.	Dana Perimbangan	Dana yang diberikan kepada pemerintah daerah	Dana Perimbangan = Dana Bagi Hasil (DBH) +	Rasio

		yang bersumber dari APBN untuk membantu membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.	Dana Alokasi Umum (DAU) + Dana Alokasi Khusus (DAK). Sumber Undang-undang nomor 23 tahun 2014	
4.	Opini Audit	Opini Audit merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) = 4 Wajar Dengan Pengecualian (WDP) = 3 Tidak Wajar (TW) = 2 Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) = 1 Sumber (Az Zahrah et al., 2024)	Ordinal
4.	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	Kinerja keuangan Instansi Pemerintah merupakan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi,	Rasio Efektivitas= $\frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$ Sumber (Manimbaga et al., 2021)	Rasio

		misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan - kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.	
--	--	--	--

3.7. Teknik Analisis

Berdasarkan rumusan masalah serta hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data untuk menguji hipotesis dan memecahkan masalah.

3.8. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran pada data yang disajikan. Data penelitian yang terdapat pada penelitian ini meliputi kinerja keuangan, pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan dan opini audit. Alat statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini yaitu nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, median dan standar deviasi. Adapun alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 26.

3.8.1. Uji Asumsi Klasik

Uji regresi linier berganda dapat dilakukan apabila lolos melalui uji asumsi klasik serta memenuhi *Best Linier Unbias Estimator* (BLUE). Dengan demikian perlu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi:

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual data pada model regresi linier berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan uji kolmogorov simirnov. Adapun pengujian normalitas data dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Jika nilai signifikansi $>0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residual data penelitian adalah normal.
- b. Jika nilai signifikansi $<0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa distribusi residual data penelitian tidak normal

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi residual periode pengamatan dengan pengamatan sebelumnya, melalui deteksi *Durbin Watson*. Kriteria uji *Durbin Watson* (DW) adalah apabila angka DW berada di d_U sampai dengan $4-d_U$ maka dinyatakan bebas autokorelasi.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel bebas (independen). Regresi data panel yang baik adalah jika antar variabel bebas tidak terdapat korelasi. Namun apabila terdapat korelasi

antar variabel bebas maka dapat mengganggu hubungan variabel terikat (dependen) dengan variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah dengan melihat *Centered Varians Inflation Factors (VIF)*, apabila $VIF < 10$ maka tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas.

4. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ada atau tidaknya kesamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lainnya dalam satu model regresi. Dalam pengujian ini menggunakan model uji Glejser, uji Glejser adalah uji hipotesis yang digunakan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah tidak mengalami heteroskedastisitas. Apabila nilai probabilitas $> 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas, namun apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka terjadi heteroskedastisitas atau tidak lolos uji.

3.8.2. Model Regresi Berganda

Pada penelitian ini pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linier berganda. Uji regresi berganda dilakukan dengan mengestimasi variabel dependen (Y) dengan lebih dari satu variabel independen (X). Berikut merupakan rumus yang digunakan dalam analisa regresi linier berganda.

$$KK = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 BM + \beta_3 DP + \beta_4 OA + \epsilon_i$$

Keterangan:

KK = Kinerja Keuangan

α = Konstanta

PAD = Pendapatan Asli Daerah

BM = Belanja Modal

DP = Dana Perimbangan

OA = Opini Audit

$\beta_{1,2,3,4}$ = Koefisien regresi masing-masing variabel

e = Standar error

3.8.3. Uji Kelayakan Model

1. Uji F

Uji F dilakukan untuk menentukan apakah model regresi layak digunakan dalam penelitian atau tidak. Kriteria yang digunakan untuk menguji kelayakan model regresi adalah sebagai berikut:

1. Jika tingkat signifikansi $\leq 0,05$, menunjukkan model regresi fit atau layak digunakan dalam penelitian.
2. Jika Tingkat signifikansi $> 0,05$, menunjukkan model regresi tidak fit atau tidak layak digunakan dalam penelitian.

2. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi yang kemudian dilambangkan oleh *Adjusted R2* digunakan untuk mengetahui seberapa mampu variabel dependen dijelaskan oleh variabel independennya. Semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin mampu variabel independent menjelaskan variabel dependen.

3.8.4. Pengujian Hipotesis Statistik (Uji t)

Uji t adalah pengujian yang dilakukan untuk menguji apakah terdapat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Uji t dapat memberikan hasil yang positif maupun negatif. Nilai positif menunjukkan variabel independen tersebut berbanding lurus terhadap variabel dependen, sedangkan hasil negatif menunjukkan independen berbanding terbalik terhadap variabel dependen. Berikut acuan untuk menentukan apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen:

1. Pengujian PAD terhadap Kinerja Keuangan

$H_0 : \beta \leq 0$, artinya Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

$H_a : \beta > 0$, artinya Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

2. Pengujian Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan

$H_0 : \beta \leq 0$, artinya Belanja Modal tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

$H_a : \beta > 0$, artinya Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

3. Pengujian Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan

$H_0 : \beta \leq 0$, artinya Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

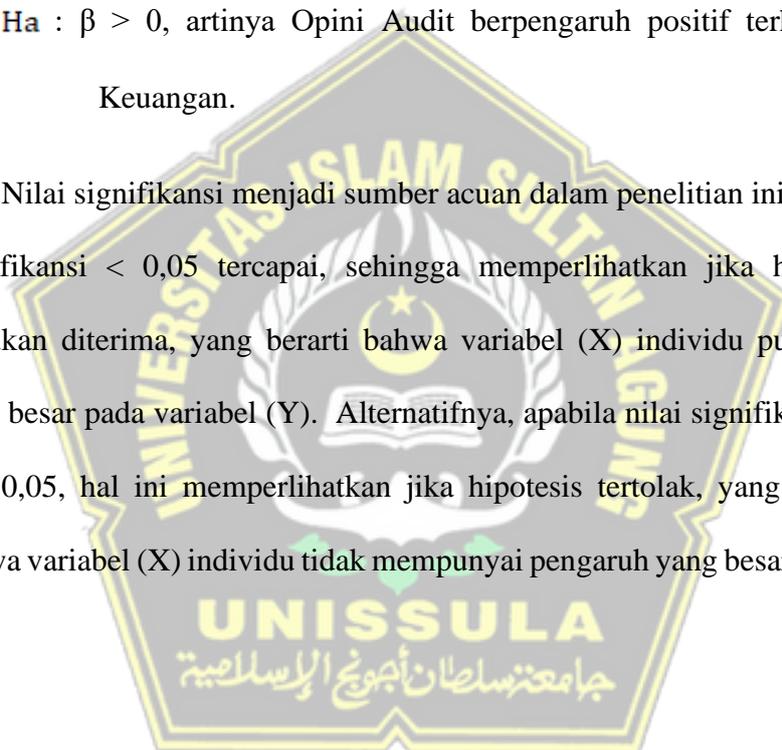
$H_a : \beta > 0$, artinya Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

4. Pengujian Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan

$H_0 : \beta \leq 0$, artinya Opini Audit tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan.

$H_a : \beta > 0$, artinya Opini Audit berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan.

Nilai signifikansi menjadi sumber acuan dalam penelitian ini. Apabila nilai signifikansi $< 0,05$ tercapai, sehingga memperlihatkan jika hipotesis yang diajukan diterima, yang berarti bahwa variabel (X) individu punya pengaruh yang besar pada variabel (Y). Alternatifnya, apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, hal ini memperlihatkan jika hipotesis tertolak, yang memiliki arti bahwa variabel (X) individu tidak mempunyai pengaruh yang besar pada variabel (Y).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) dan Laporan Hasil Pemeriksaan kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2020–2023. Data penelitian diperoleh dari Badan Pusat Statistika dan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Jawa Tengah. Obyek penelitian ini sejumlah 35 kabupaten/kota dikumpulkan melalui sensus. Data yang digunakan selama 4 tahun yaitu tahun 2020-2023 sehingga total data yang digunakan sebanyak 140. Adapun data kota/kabupaten di Jawa Tengah digunakan dalam penelitian ini digunakan pada lampiran 1 halaman 75.

4.2. Hasil Uji Analisis Data

4.2.1. Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran suatu data yang ditinjau dari nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), median, dan nilai standar deviasi. Gambaran statistik deskriptif dari semua variabel dalam penelitian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Median	Std. Deviation
Pendapatan Asli Daerah	140	700000000	1794318750	1017805232	992250000,0	1868869243,2
Belanja Modal	140	500000000	2450086000	83882088,2	796277950,0	282454297,8
Dana Perimbangan	140	524501449	3820162500	1913491503	1963102229	550118337,0
Opini Audit	140	3	4	3,99	4,00	,085
Kinerja Keuangan	140	98	117	107,33	107,00	4,116
Valid (listwise)	N 140					

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Berdasarkan dari tabel 4.1 maka hasil analisis statistik deskriptif yaitu N merupakan jumlah data yang diolah dalam penelitian ini yaitu sebanyak 140 data, data tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- (1) Variabel independen Pendapatan Asli Daerah, hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai mean atau rata-rata sebesar 1.017.805.232 dengan nilai minimum yaitu Kabupaten Wonosobo sebesar 700.000.000, nilai maksimum Kota Semarang sebesar 1.794.318.750. Sedangkan untuk nilai median sebesar 992.250.000,0 dan standar deviasi sebesar 186.869.243,2. Nilai median dan standar deviasi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki tingkat variasi data yang normal.
- (2) Variabel Independen Belanja Modal, hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai mean atau rata-rata sebesar 838.832.088,2 dengan nilai

minimum yaitu Kabupaten Wonosobo sebesar 500.000.000 dan nilai maksimum Kota Semarang sebesar 2.450.086.000. Nilai median sebesar 796.277.950,0 dan standar deviasi sebesar 282.454.297,8. Nilai standar deviasi variabel Belanja Modal lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal memiliki tingkat variasi data yang normal.

- (3) Variabel Independen Dana Perimbangan, hasil dari analisis statis deskriptif ini menunjukkan nilai mean atau rata-rata sebesar 1.913.491.503. Kemudian memiliki nilai minimum yaitu Kabupaten Wonosobo sebesar 524.501.449 dan nilai maksimum Kota Semarang sebesar 3.820.162.500. Sedangkan untuk nilai median sebesar 1.963.102.229 dan nilai standar deviasi sebesar 550.118.337,0. Nilai median dan standar deviasi variabel Dana Perimbangan lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan memiliki tingkat variasi data yang normal.
- (4) Variabel Independen Opini Audit, hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai mean atau rata-rata sebesar 3,99 dengan nilai minimum sebesar 3 oleh Kabupaten Pemalang dan nilai maksimum sebesar 4. Nilai median sebesar 4,00 dan standar deviasi sebesar 0,085. Nilai median dan standar deviasi variabel Opini Audit lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Opini Audit memiliki tingkat variasi data yang normal.

(5) Variabel Dependen Kinerja Keuangan, hasil dari analisis statistik deskriptif ini menunjukkan nilai mean atau rata-rata sebesar 107,33 dengan nilai minimum Kabupateb Banjarnegara yaitu sebesar 98 dan milai maksimum Kabupaten Sukoharjo sebesar 117. Nilai median sebesar 107,00 dan standar deviasi sebesar 4,116. Nilai median dan standar deviasi variabel Kinerja Keuangan lebih kecil dibandingkan dengan nilai mean atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Kinerja Keuangan memiliki tingkat variasi data yang normal.

4.3. Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah distribusi residual data pada regresi linear berdistribusi normal. Dalam model regresi linear, asumsi ini diwakili oleh nilai eror yang berdistribusi normal. Model regresi ini dianggap baik apabila memiliki distribusi normal atau hampir normal, dan sehingga pantas untuk diuji secara statistik. *Test of Normality* Kolmogorov-Smirnov digunakan dalam penelitian ini. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, data dianggap normal. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05, data dianggap tidak normal. Berikut hasil uji normalitas kolmogrov-smirnov:

Tabel 4. 2 Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	4,07585629
Most Extreme Differences	Absolute	,040
	Positive	,029
	Negative	-,040
Test Statistic		,040
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Dari tabel 4.2 tersebut dapat dilihat bahwa nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0.200 yang artinya lebih besar dari 0,05 dan menunjukkan bahwa distribusi residual data normal.

2. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui korelasi residual periode pengamatan dengan pengamatan sebelumnya melalui deteksi Durbin Watson. Kriteria uji Durbin Watson (DW) menetapkan bahwa apabila angka DW berada di antara $2d_U$ dan $4-d_U$, maka dinyatakan bebas autokorelasi. Tabel 4.4 menunjukkan keputusan apakah ada atau tidaknya autokorelasi.

Tabel 4. 3 Hasil Uji Autokorelasi

No	Durbin-Watson	Keterangan
1	1,823	Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Berdasarkan tabel 4.3 diperoleh hasil Durbin-Watson test sebesar 1,823. Dimana $1,823 > 1,7830$ (dU), serta $1,823 < 2,217$ (4-dU). Sehingga, nilai DW sudah sesuai dengan ketentuan yakni nilai DW lebih besar daripada dU dan nilai DW lebih kecil daripada 4-du, atau sudah sesuai dengan konsep $dU < DW < 4-dU$. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat atau bebas autokorelasi.

3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat hasil pengolahan data pada *tolerance value* lebih dari 0,1 atau nilai VIF kurang dari 10. Ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel independen atau apakah setiap variabel independen menjelaskan variabel independen lainnya. Hasil uji multikolinearitas berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics		Keterangan
		Tolerance	VIF	
1	Pendapatan Asli Daerah	,151	6,620	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	Belanja Modal	,161	6,224	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	Dana Perimbangan	,796	1,257	Tidak Terjadi Multikolinearitas
	Opini Audit	,999	1,001	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Hasil uji multikolinearitas untuk variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan bahwa nilai toleransi sebesar 0,151 atau lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 6,620 atau lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil uji multikolinearitas untuk variabel Belanja Modal menunjukkan bahwa nilai toleransi sebesar 0,161 atau lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 6,224 atau lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil uji multikolinearitas untuk variabel Dana Perimbangan menunjukkan bahwa nilai toleransi sebesar 0,796 atau lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,257 atau lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

Hasil uji multikolinearitas untuk variabel Opini Audit menunjukkan bahwa nilai toleransi sebesar 0,999 atau lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,001 atau lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.

4. Uji Heteroskedastisitas

Tujuan pengujian heteroskedastisitas adalah untuk menentukan apakah ada perbedaan varians residual dibandingkan dengan observasi dalam model regresi. Pada penelitian ini, nilai heteroskedastisitas diperiksa melalui uji Glejser. Apabila nilai Sig lebih besar dari 0,05, data tidak menunjukkan heteroskedastisitas, namun apabila nilai Sig kurang dari 0,05 maka terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji Glejser yang digunakan dalam penelitian ini ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Heteroskedastisitas

No.	Variabel	Sig.	Keterangan
1.	Pendapatan Asli Daerah	,785	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
2.	Belanja Modal	,607	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
3.	Dana Perimbangan	,125	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
4.	Opini Audit	,178	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Hasil uji heteroskedastisitas untuk variabel Pendapatan Asli Daerah menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,785, yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas untuk variabel Belanja Modal menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,607, yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas untuk variabel Dana Perimbangan menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,125, yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas untuk variabel Opini Audit menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,178, yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari tingkat signifikansi 5% atau 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas.

4.4. Model Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menilai empat variabel, yaitu Kinerja Keuangan sebagai variabel dependen dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal (BM), Dana Perimbangan (DP), dan Opini Audit (OA) sebagai variabel independen. Hasil dari regresi linear berganda disajikan pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model		Coefficients			
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	124,249	1,677		
2	Pendapatan Asli Daerah	3,957E-9	,000	1,051	,000
3	Belanja Modal	-1,148E-9	,000	-,461	,000
4	Dana Perimbangan	-3,298E-10	,000	-,258	,000
5	Opini Audit	-4,847	,415	-,582	,000

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Berdasarkan tabel diatas didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 124,249 + 3,957E-9 X_1 - 1,148E-9 X_2 - 3,298E-10 X_3 - 4,847 X_4 + e$$

Dari persamaan regresi linear berganda diatas, dapat diinterpretasikan yaitu:

- Nilai konstanta (constant) menunjukkan angka 124,249 dengan arah positif yang memiliki arti apabila variabel Pendapatan Asli Daerah (X1), Belanja Modal (X2), Dana Perimbangan (X3) Dan Opini Audit (X4) dianggap konstan, maka besarnya variabel Kinerja Keuangan (Y) adalah sebesar 124,249.
- Koefisien regresi variabel Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka 3,957E-9 dengan arah positif yang artinya setiap peningkatan variabel Pendapatan Asli Daerah sebanyak 1 satuan

berarti akan meningkatkan variabel Kinerja Keuangan sebanyak $3,957E-9$ serta beranggapan variabel lain dalam bentuk konstan.

- c. Koefisien regresi variabel Belanja Modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka $1,148E-9$ dengan arah negatif yang Artinya setiap peningkatan variabel Belanja Modal sebanyak 1 satuan berarti akan menurunkan variabel Kinerja Keuangan sebanyak $1,148E-9$ serta beranggapan variabel lain dalam bentuk konstan.
- d. Koefisien regresi variabel Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka $3,298E-10$ dengan arah negatif yang Artinya setiap peningkatan variabel Dana Perimbangan sebanyak 1 satuan berarti akan menurunkan variabel Kinerja Keuangan sebanyak $3,298E-10$ serta beranggapan variabel lain dalam bentuk konstan.
- e. Koefisien regresi variabel Opini Audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan angka 4,847 dengan arah negatif yang memiliki arti setiap peningkatan opini audit sebesar 1 satuan maka akan menurunkan kinerja pemerintah daerah sebesar 4,847 serta beranggapan variabel lain dalam bentuk konstan.

4.5. Uji Kelayakan Model (Goodness Of Fit)

a) Uji F

Uji F menentukan apakah variabel terikat dan semua variabel bebas dalam model regresi dapat dipengaruhi secara bersama-sama (simultan). Pengujian ini dilakukan dengan melihat nilai signifikansi dengan taraf

signifikansi sebesar 0,05 atau 5%. Adapun hasil uji F melalui pengolahan data dengan menggunakan SPSS dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4. 7 Hasil Uji F

No.	Model	Sig.	Keterangan
1	Regression	,000	Hipotesis Diterima

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Berdasarkan hasil dari uji statistik F, nilai F-hitung menunjukkan sebesar 66,843 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 sedangkan nilai F-tabel sebesar 2,44. Hal ini berarti nilai F hitung lebih besar daripada F tabel ($66,843 > 2,44$) dan nilai signifikansi lebih kecil dari 5% ($0,000 < 0,005$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memiliki Goodness of Fit Model yang berarti variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.

b) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi atau R Square (R^2) adalah ukuran yang mengukur seberapa jauh kemampuan model untuk menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 dan 1, dan hasil regresi dikatakan lebih baik jika nilai R^2 meningkat atau mendekati 1. Ini menunjukkan bahwa variabel independen memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk memprediksi variabel dependen. Tabel 4.8 berikut menunjukkan hasil uji koefisien determinasi.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,815 ^a	0,664	0,655	0,414

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 26, 2025

Berdasarkan hasil dari uji koefisien determinasi, nilai adjusted R square (Adjusted R^2) menunjukkan sebesar 0,655. Hal ini berarti 65,5% kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah, belanja modal, dana perimbangan, dan opini audit. Sedangkan, sisanya 34,5% (100%-65,5%) kinerja keuangan dipengaruhi oleh variabel lain.

4.6. Pengujian Hipotesis

4.6.1. Uji Parsial

Berdasarkan tabel 4.6 tolak ukur pada uji t dapat dilihat melalui arah koefisien regresi dan nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat dijelaskan bahwa:

a. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) terhadap Kinerja Keuangan(Y)

Berdasarkan pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi variabel PAD memiliki koefisien regresi sebesar 3,957E-9 dengan arah positif dan nilai signifikansi 0,000, di bawah 0,05 menunjukkan bahwa variabel PAD memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan. H_1 menyatakan PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan olah data menunjukkan bahwa hipotesis diterima.

b. Pengaruh Belanja Modal (X2) terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Berdasarkan pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi variabel Belanja Modal memiliki koefisien regresi sebesar $1,148E-9$ dengan arah negatif dan nilai signifikansi $0,000$, di bawah $0,05$ menunjukkan bahwa variabel Belanja Modal memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. H_2 menyatakan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan olah data menunjukkan bahwa hipotesis ditolak.

c. Pengaruh Dana Perimbangan (X3) terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Berdasarkan pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi variabel Dana Perimbangan memiliki koefisien regresi sebesar $3,298E-10$ dengan arah negatif dan nilai signifikansi $0,000$, di bawah $0,05$ menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. H_3 menyatakan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan olah data menunjukkan bahwa hipotesis ditolak.

d. Pengaruh Opini Audit (X4) terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Berdasarkan pengujian di atas, didapatkan hasil estimasi variabel Opini Audit memiliki koefisien regresi sebesar $4,847$ dengan arah negatif dan nilai signifikansi $0,000$, di bawah $0,05$ menunjukkan bahwa variabel Opini Audit memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. H_4 menyatakan Opini Audit tahun sebelumnya berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Berdasarkan olah data menunjukkan bahwa hipotesis ditolak.

4.7. Pembahasan Hasil Penelitian

4.7.1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbukti berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri. Semakin besar PAD, semakin mandiri dan efisien daerah dalam mengelola keuangannya tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD akan meningkatkan kinerja keuangan pemerintah karena pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Tengah menekankan bahwa PAD berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah, seperti pajak, retribusi, dan penerimaan lainnya.

Dalam teori agensi, hubungan antara pemerintah daerah sebagai *agent* dan masyarakat sebagai *principal* menuntut akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator penting untuk menilai kinerja pemerintah sebagai *agent* adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini karena menunjukkan seberapa baik pemerintah dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal secara mandiri tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Peningkatan PAD di Jawa Tengah seharusnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah dapat mengelola sumber daya dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam teori agensi, keberhasilan agen tidak hanya diukur dari seberapa baik mereka meningkatkan PAD, tetapi juga dari seberapa baik mereka mengelola PAD dengan cara yang efisien dan menguntungkan masyarakat.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh H. M. Sari et al., (2021), PAD memengaruhi kinerja keuangan daerah. Hal ini ditandai dengan semakin banyak PAD yang diperoleh, semakin baik kinerja keuangan pemerintah daerah. Ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pembangunan dan meningkatkan potensi kekayaan daerahnya yang akan menghasilkan peningkatan PAD.

4.7.2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Variabel Belanja Modal terbukti tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Belanja modal seringkali tidak diiringi dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan. Belanja modal dimaksudkan untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur dan fasilitas publik, tetapi dampaknya terhadap kinerja keuangan tidak langsung terasa dalam jangka pendek. Selain itu, ada beberapa masalah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan belanja modal, seperti keterlambatan proyek, pemborosan anggaran, dan output yang buruk. Akibatnya, belanja modal yang tinggi tidak selalu menunjukkan kinerja keuangan yang baik, terutama dalam hal infrastruktur.

Berdasarkan teori agensi, pemerintah daerah bertindak sebagai *agent* yang diberi mandat oleh masyarakat (*principal*) untuk mengelola keuangan publik secara efektif, termasuk dalam pengalokasian belanja modal. Belanja modal seharusnya berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah karena belanja modal merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur, fasilitas umum, dan layanan publik. Pengeluaran ini

seharusnya mampu meningkatkan produktivitas daerah, memperkuat ekonomi lokal, dan pada akhirnya menghasilkan peningkatan pendapatan daerah yang berkelanjutan, serta efisiensi pengeluaran pemerintah. Dalam kerangka teori agensi, hal ini merupakan bentuk nyata dari tanggung jawab pemerintah sebagai agen dalam mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat sebagai *principal*. Teori agensi pada umumnya menyatakan bahwa jika Belanja Modal meningkat maka akan diikuti peningkatan Kinerja Keuangan. Temuan dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa tingginya Belanja Modal yang dikeluarkan akan menurunkan Kinerja Keuangan. Namun, Belanja modal seringkali tidak direncanakan secara optimal, menyebabkan proyek yang didanai tidak tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sementara itu, indikator kinerja keuangan daerah biasanya diukur dalam jangka pendek, seperti tahunan, sehingga dampaknya belum terlihat secara langsung selama periode pengamatan. Akibatnya, tingkat efisiensi pelaksanaan proyek belanja modal masih rendah, ditandai dengan keterlambatan.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Digdowiseiso et al., (2022) yang menyatakan Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan. Namun, sejalan dengan hasil penelitian Amin Insani et al., (2023) dan Maulina et al., (2021) yang menyatakan Belanja Modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan.

4.7.3. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah

Dana perimbangan terbukti tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan karena daerah cenderung pasif, penggunaannya terbatas oleh aturan pusat, dan sering difokuskan pada belanja rutin, bukan pembangunan strategis yang bisa meningkatkan efisiensi atau kemandirian fiskal. Hal ini disebabkan karena banyak pemerintah daerah terlalu bergantung pada dana perimbangan, sehingga kurang terdorong untuk mengelola keuangan secara mandiri dan optimal. Selain itu, sebagian besar dana ini sudah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah pusat, sehingga daerah tidak memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikannya dengan kebutuhan lokal.

Berdasarkan teori agensi, pemerintah daerah bertindak sebagai agen yang diberi mandat oleh masyarakat (*principal*) untuk mengelola dana publik secara transparan, efisien, dan bertanggung jawab. Dana perimbangan, yang diberikan oleh pemerintah pusat, seharusnya menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja keuangan secara keseluruhan. Temuan pada penelitian ini menunjukkan bahwa dana perimbangan yang seharusnya menjadi instrumen fiskal untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah, ternyata tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya dana transfer dari pemerintah pusat tidak secara otomatis mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketergantungan terhadap dana perimbangan tanpa diimbangi dengan penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran justru berpotensi menciptakan

kelemahan struktural dalam kinerja keuangan, di mana pemerintah daerah cenderung pasif dan kurang terdorong untuk menggali potensi pendapatan asli secara optimal.

Penelitian ini tidak sejalan dengan Maulina et al., (2021) yang menyatakan semakin tinggi dana perimbangan diikuti dengan peningkatan Kinerja Keuangan. Namun, sejalan dengan penelitian oleh Fernandes & Hilwani, (2021) dan Digdowiseiso et al., (2022). Banyaknya bantuan Dana Perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat yang berdampak pada turunnya tingkat kemandirian suatu daerah.

4.7.4. Pengaruh Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah

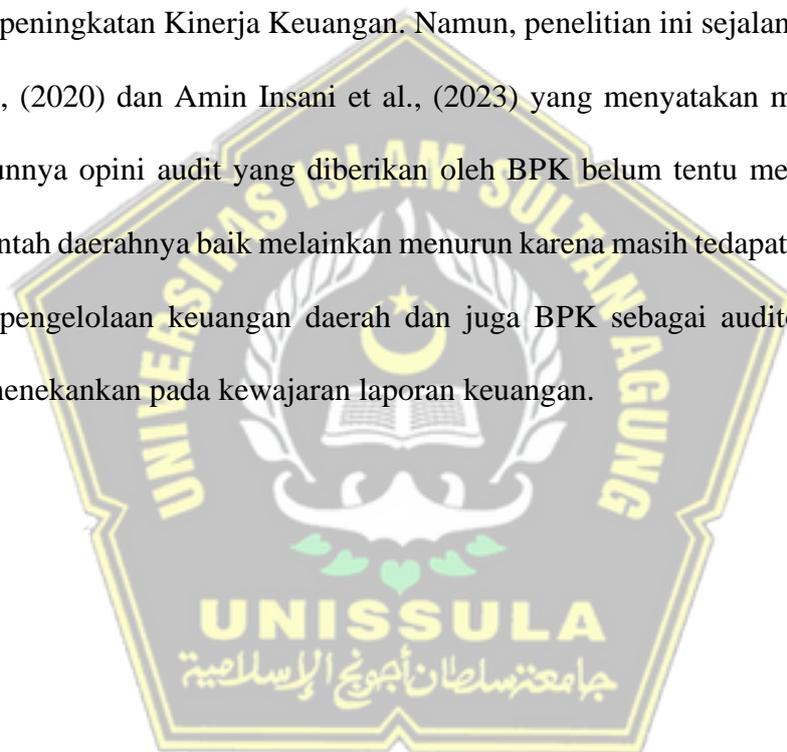
Opini Audit terbukti tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan. Opini audit tahun sebelumnya (T-1) sangat penting untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, termasuk di Jawa Tengah. Hasil penilaian BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah untuk tahun sebelumnya menunjukkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Laporan keuangan disusun dengan baik dan dapat dipercaya, menurut opini audit yang baik seperti Wajar Tanpa Pengecualian. Opini audit ini memiliki efek yang signifikan dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah, mempermudah mendapatkan pembiayaan, dan memberikan umpan balik yang bermanfaat tentang pengelolaan anggaran. Hasil audit dapat menyebabkan peningkatan pengawasan dan akuntabilitas. Dengan

mempertimbangkan hasil audit dan menerapkan rekomendasi yang diberikan, pemerintah daerah dapat terus meningkatkan kinerja keuangan.

Berdasarkan teori agensi, Opini Audit merupakan salah satu bentuk mekanisme pengawasan eksternal yang bertujuan untuk memastikan bahwa agen (pemerintah daerah) menjalankan tugas pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel kepada *principal* (masyarakat). Secara teori, opini audit yang baik seperti Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seharusnya menjadi indikator bahwa agen telah bertindak sesuai kepentingan *principal*, dan pada akhirnya mendorong peningkatan kinerja keuangan. Namun, hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa opini audit tahun sebelumnya tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Meskipun opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan alat penting untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan, ada situasi di mana opini audit tahun sebelumnya tidak selalu mencerminkan kinerja keuangan pemerintah daerah di tahun berikutnya. Pandemi COVID-19 adalah salah satu kondisi tersebut. Sejak awal tahun 2020, pandemi telah memengaruhi kebijakan fiskal dan pengelolaan anggaran di banyak tempat. Redistribusi anggaran, pengaturan belanja, dan penyesuaian prioritas program untuk penanggulangan pandemi dan pemulihan ekonomi harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Akibatnya, banyak target kinerja keuangan gagal dicapai sesuai rencana karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan bukan tata kelola keuangan yang buruk. Menurut hasil statistik deskriptif, nilai rata-rata variabel opini audit cenderung seragam. Ini karena sebagian besar entitas sampel penelitian menerima opini audit Wajar Tanpa

Pengecualian (WTP). Homogenitas opini audit tersebut menyebabkan perilaku data menjadi agak stabil dan tidak secara signifikan menunjukkan perbedaan performa antar entitas. Oleh karena itu, opini audit WTP tidak cukup untuk membedakan kinerja yang diukur, yang tercermin dari rata-rata data yang hampir sama.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Suandani et al., (2021) yang menyatakan semakin baik Opini Audit yang diterima pemerintah daerah maka akan diikuti peningkatan Kinerja Keuangan. Namun, penelitian ini sejalan dengan Endri & Dini, (2020) dan Amin Insani et al., (2023) yang menyatakan meningkat atau menurunnya opini audit yang diberikan oleh BPK belum tentu membuat kinerja pemerintah daerahnya baik melainkan menurun karena masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah dan juga BPK sebagai auditor pemerintah lebih menekankan pada kewajaran laporan keuangan.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan sendiri. Semakin besar PAD, semakin mandiri dan efisien daerah dalam mengelola keuangannya tanpa terlalu bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.
2. Belanja modal tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Data menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan dalam belanja modal, kinerja keuangan tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal tidak selalu berbanding lurus dengan kinerja keuangan. Belanja modal seringkali tidak diiringi dengan efisiensi dan efektivitas penggunaan belanja modal tidak optimal sehingga tidak mempengaruhi peningkatan kinerja keuangan.
3. Dana Perimbangan tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Ketergantungan terhadap dana perimbangan tanpa diimbangi dengan penguatan kapasitas fiskal dan efisiensi penggunaan anggaran justru berpotensi menciptakan kelemahan struktural dalam kinerja keuangan. Meskipun terdapat alokasi dana perimbangan yang signifikan, data menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tidak mengalami peningkatan yang berarti. Hal ini

menunjukkan bahwa penggunaan dana tersebut tidak efektif dalam meningkatkan kinerja.

4. Opini Audit tidak terbukti berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 yang memengaruhi kondisi keuangan secara luas, serta perilaku data yang menunjukkan kecenderungan rata-rata entitas memperoleh opini WTP, sehingga tidak memberikan variasi yang cukup untuk memengaruhi atau membedakan kinerja secara statistik.

5.2. Implikasi

1. Implikasi Teoritis

Pengujian ini berpotensi memperluas pengetahuan teoritis akademisi tentang kinerja keuangan pemerintah daerah, menjadi referensi bermanfaat, dan memperluas pemahaman mereka tentang topik tersebut.

2. Implikasi Praktisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar bahan masukan, motivasi serta evaluasi untuk mengembangkan strategi, kebijakan maupun program-program yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil olah data, adapun keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Penggunaan opini audit sebagai variabel independen untuk mengukur kesesuaian dengan standar akuntansi, sementara kinerja keuangan pemerintah daerah diukur berdasarkan indikator yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan efisiensi dan

efektivitas pengelolaan anggaran. Hal ini dapat menyebabkan hasil yang kurang komprehensif, karena opini audit hanya mencakup aspek kepatuhan dan penyajian laporan keuangan, tanpa mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan, seperti manajemen risiko, kebijakan fiskal, dan dampak ekonomi makro. Selain itu, adanya perbedaan dalam interpretasi dan penerapan standar akuntansi di berbagai daerah dapat mempengaruhi hasil penelitian dan mengurangi generalisasi temuan.

2. Penelitian ini mengambil beberapa variabel independen sehingga hasil penelitian ini belum sepenuhnya dapat menjelaskan semua variabel yang mempengaruhi tingkat kinerja keuangan pemerintah daerah, ruang lingkup yang hanya mencakup data dan kondisi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah secara statistik dan informasi tertulis tentang APBD pada tahun 2020-2023.

5.4. Agenda Penelitian Mendatang

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang telah diidentifikasi, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel yang dianalisis dengan memasukkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, seperti manajemen risiko, kebijakan fiskal, dan kondisi ekonomi makro. Penelitian juga sebaiknya menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif, seperti analisis kuantitatif dan kualitatif, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara opini audit dan kinerja keuangan. Selain itu, disarankan untuk melakukan studi perbandingan antar daerah yang memiliki karakteristik dan kebijakan yang berbeda, guna menilai konsistensi dan relevansi opini audit dalam konteks yang lebih luas. Dengan demikian, hasil

penelitian selanjutnya dapat memberikan wawasan yang lebih holistik dan aplikatif dalam meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kemudian penulis juga menyarankan peneliti selanjutnya untuk dapat menambah jumlah sampel yang dijadikan responden dalam penelitian selanjutnya agar hasilnya dapat lebih baik dalam menjelaskan faktor kinerja keuangan pemerintah daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-lintangi, R. M., Yohani, & Hidayah, R. (2023). Determinan kinerja keuangan pemerintah daerah. 5, 214–224.
- Amin Insani, Rahayu, S., & Misni Erwati. (2023). Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Akurasi : Jurnal Studi Akuntansi Dan Keuangan*, 6(1), 109–125. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v6i1.343>
- Andani, M., Sarwani, S., & Respati, N. W. (2019). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Dan Opini Audit Terhadap Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 111–130. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.9.2.111-130>
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., Ernitawati, Y., & Dumadi, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten Dan Kota Se-Eks Karesidenan Pekalongan Periode 2016-2020. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(1), 60–80. <https://doi.org/10.29303/jaa.v7i1.165>
- Ariska, R. Y. (2022). Dampak Penghasilan Asli Daerah , Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota Provinsi Sumatera Utara Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 2, 1–11.
- Az Zahrah, F., Zaen, M. R., & Mellinia, S. P. (2024). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Opini Audit, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi (JUMIA)*, 2(1), 369–384.
- Azhar, I. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Langsa. *Jurnal Transformasi Administrasi*, 11(02), 164–174. <https://doi.org/10.56196/jta.v11i02.190>
- Digdowiseiso, K., Subiyanto, B., & Cahyanto, R. D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 4(6), 2572–2580. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue/article/view/1150>
- Dwigantara, M. P., & Handayani, N. (2020). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Intervening. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(10), 1–22.
- Edwar, D., Bernardin, Y., Agustin, W. D., Zahra, Y., & Fitria, N. (2023). Kinerja Keuangan Daerah : Penerimaan Pad (Pendapatan Asli Daerah). 4(2), 92–103.
- Endri, L., & Dini, H. W. (2020). Pengaruh Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 7(2), 1–8.

- Fernandes, J., & Hilwani, A. N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada 19 Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat Tahun 2019-2021. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Scholastics*, 4(2), 266–282. <https://doi.org/10.58192/profit.v2i2.750>
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2), 116–130. <https://doi.org/10.18196/jati.v5i2.14194>
- Haque, K. S., & Rohman, A. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2020. *Diponegoro Journal of Accounting*, 11(4), 1–10.
- Harianto, R., & Aini, N. (2021). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen terhadap Biaya Utang. *Liability*, 03(1), 55–76. <https://journal.uwks.ac.id/index.php/liability>
- Harty, M. F. N., Da Silva, P., & Luju, E. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2016-2020 (Studi Kasus Pada Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Sikka). *Jurnal Nusanipa*. <https://repository.nusanipa.ac.id/id/eprint/479/>
- Manimbaga, F., Sondakh, J. J., & Pinatik, S. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Hitung Tahun Anggaran 2014-2018. *Jurnal EMBA*, 9(2), 982–992.
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research.*, 5(2), 523–531. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>
- Ramadana, S. W., & Bahgia, S. (2023). Determinansi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. 7(April), 1831–1840.
- Rasyid, Y., Suci, R. G., & Putri, A. M. (2022). Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Bpk Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau. *PROMOSI (Jurnal Pendidikan Ekonomi)*, 10(2), 80–93. <https://doi.org/10.24127/pro.v10i2.6589>
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Mapping the Posthuman*, 3(1), 56–60. <https://doi.org/10.4324/9781003322603-5>
- Sari, H. M., Afriyanti, & Edisa, H. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Keuangan Dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kerinci. *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, 3(12), 109–125.

- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). Pemerintah Daerah Ni Made Diah Permata Sari 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali. 8(8), 4759–4787.
- Suandani, P., Putu, I. G., & Astawa, B. (2021). Pengaruh Opini Audit , Belanja Modal , Pendapatan Asli Daerah , Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali Tahun 2015-2019. 728–739.
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. Indonesian Accounting Research Journal, 1(1), 86–97.

